

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan Pustaka akan memuat hasil penelitian terdahulu dan teori atau konsep yang berhubungan dengan fokus penelitian, berikut tiga penelitian dengan tingkat kesamaan yang relevan, namun tetap menunjukkan adanya perbedaan baik dari segi teori, konsep, ataupun studi empirisnya.

Peran International *Labour Organization* dalam Mengatasi Fenomena *Seafood Slavery* di Thailand Tahun 2019-2023 oleh Alda Sapitri, Angga Nurdin Rachmat, dan Muhammad Fauzan Alamari merupakan publikasi Jurnal Hubungan Internasional pada Juni 2024. Penelitian ini membahas keterlibatan International Labour Organization (ILO) dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan Thailand melalui pendekatan Liberalisme Institusional. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat mendorong reformasi melalui penetapan standar ketenagakerjaan serta dukungan dalam implementasinya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti terkait praktik *modern slavery* di sektor perikanan Thailand serta keterlibatan aktor luar dalam mendorong perubahan kebijakan. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada peran organisasi internasional sebagai penggerak reformasi dan belum secara spesifik membahas keterlibatan aktor luar setelah pencabutan *yellow card*. Sementara penelitian penulis fokus pada keterlibatan Uni Eropa pasca-pencabutan *yellow card* yang belum menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya.

Shaping Ocean Governance: A Study of EU Normative Power on Thailand's Sustainable Fisheries oleh Ajaree Tavornmas dan Kasira Cheeppensook yang dipublikasikan dalam Jurnal Internasional Studi Kebijakan Maritim pada Maret 2020. Penelitian ini membahas pengaruh Uni Eropa dalam membentuk tata kelola perikanan Thailand melalui perspektif *Normative Power EuropeI*. Melalui kebijakan IUU Fishing, Uni Eropa mendorong Thailand untuk menyesuaikan kebijakan sektor perikananannya agar lebih berkelanjutan dan sejalan dengan aturan internasional. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Uni Eropa tidak hanya

bertindak sebagai aktor ekonomi saja, tetapi juga sebagai penyebar norma internasional dalam membentuk tata kelola perikanan Thailand. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterlibatan Uni Eropa dalam memengaruhi kebijakan sektor perikanan di Thailand. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada Uni Eropa dalam membentuk arah kebijakan perikanan Thailand melalui penyebaran norma dan standar. Sementara itu, penelitian penulis lebih menempatkan pada keterlibatan Uni Eropa pasca-pencabutan *yellow card* dalam kebijakan perdaganganannya melalui *conditionality* yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga belum secara spesifik membahas terkait keberlanjutan keterlibatan Uni Eropa dalam penanganan ketenagakerjaan setelah berakhirnya kebijakan *yellow card*.

From breaker to Follower: Dinamika Proses Domestikasi Norma Anti-Perbudakan Modern oleh Pemerintah Thailand oleh Muhammad Subhan, Roihanatul Maziyah, Marten Hanura, Palupi Anggraheni, dan Dewi Setiyaningsih yang dipublikasikan dalam Jurnal Studi Hubungan Internasional pada Februari 2025. Penelitian ini membahas terkait jaringan advokasi transnasional dapat memengaruhi perubahan kebijakan Thailand dalam menangani praktik *modern slavery* di sektor perikanan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konstruktivis dengan konsep *norm life cycle* dari Finnemore dan Sikkink untuk menjelaskan proses perubahan tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan Thailand terjadi melalui proses yang bertahap, mulai dari kemunculan norma, penyebaran norma melalui tekanan internasional, hingga penerapan norma dalam kebijakan nasionalnya. Dalam proses ini, aktor non-negara seperti *Environmental Justice Foundation* (EJF) dan *Labour Protection Network* (LPN) berperan penting dalam mendorong respon pemerintah Thailand untuk menanggapi terkait *modern slavery* ini termasuk melalui ratifikasi konvensi internasional dan pembentukan kebijakan perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai keterlibatan Uni Eropa dalam memengaruhi kebijakan di sektor perikanan Thailand. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada penyebaran nilai diikuti oleh internalisasi norma melalui jaringan advokasi transnasional.

Sementara penelitian penulis lebih kepada keterlibatan Uni Eropa melalui *conditionality* dalam kebijakan perdagangan pasca-pencabutan *yellow card*. Penelitian penulis juga menyoroti keberlanjutan upaya perlindungan ketenagakerjaan setelah perubahan kebijakan tersebut yang mana belum menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya.

Selain tiga penelitian dengan tingkat kesamaan yang cukup tinggi, terdapat penelitian lain yang juga membahas praktik *modern slavery* di sektor perikanan Thailand dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian-penelitian tersebut tidak secara langsung menyoroti kebijakan perdagangan Uni Eropa dan Thailand, tetapi memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tata kelola sektor perikanan, keterlibatan perusahaan dalam industri perikanan, serta berbagai keterbatasan dalam upaya menangani eksploitasi tenaga kerja di industri tersebut.

Penelitian oleh Yoshiko Naiki dan Jaruprapa Rakpong (2022) membahas dampak sistem *carding* (hijau, kuning, merah) dari regulasi Uni Eropa terkait IUU Fishing terhadap perubahan hukum perikanan di negara ketiga dengan menganalisis secara spesifik reformasi hukum nasional Thailand selama periode *yellow card*. Penelitian ini juga mengembangkan kajian terdahulu mengenai penggunaan kekuatan pasar Uni Eropa untuk menjalankan pengaruh regulasi terhadap negara ketiga dengan mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mendorong negara ketiga melakukan reformasi regulasi nasional. Yaitu dengan kekuatan keahlian (*expertise*), pemantauan (*monitoring*), dan penetapan agenda yang dimiliki oleh Uni Eropa. Isu IUU fishing dan melihat kondisi perburuan Thailand yang buruk dan memperluas cakupan isu tersebut, Uni Eropa mampu memberikan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah Thailand untuk melakukan reformasi hukum, yang menunjukkan bahwa Uni Eropa menjalankan kekuatan keahlian, pemantauan, dan penetapan agenda guna memfasilitasi kemajuan Thailand. Penelitian ini juga turut mempertimbangkan legitimasi dari kekuatan regulasi yang dimiliki Uni Eropa terhadap negara ketiga tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterlibatan Uni Eropa dalam mendorong reformasi kebijakan perikanan Thailand melalui instrumen kebijakan dagangnya. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada proses dialog dan

reformasi hukum yang terjadi selama periode yellow card berlangsung (2015–2019), dengan fokus pada kekuatan regulasi dan legitimasi Uni Eropa sebagai aktor pasar. Penelitian tersebut belum membahas keberlanjutan keterlibatan Uni Eropa setelah pencabutan yellow card. Sementara penelitian penulis menggunakan konsep *conditionality* untuk melihat keberlanjutan tekanan Uni Eropa dalam kebijakan perdagangannya pasca-pencabutan yellow card pada 2019, dengan fokus khusus pada isu *modern slavery* yang masih belum tertangani secara tuntas.

Di tingkat regional, Belardo Prasetya Mega Jaya, et al (2025) mengkaji peran ASEAN dalam melindungi pekerja migran di sektor perikanan dari praktik *modern slavery* melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN berupaya membangun perlindungan melalui regulasi, pembentukan kelembagaan, serta berbagai strategi seperti perbaikan sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan meskipun implementasinya masih terbatas. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas praktik *modern slavery* di sektor perikanan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada peran ASEAN sebagai organisasi regional. Sedangkan penelitian penulis lebih pada kebijakan perdagangan Uni Eropa dan Thailand, juga keberlanjutan penanganan ketenagakerjaan setelah perubahan kebijakan.

Selain itu, Kadfak dan Linke (2021) membahas terkait kebijakan IUU Fishing Uni Eropa yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan perikanan, tetapi juga berkembang mencakup isu ketenagakerjaan melalui dialog antara Uni Eropa dan Thailand. Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan oleh Uni Eropa dapat mendorong reformasi di sektor perikanan Thailand termasuk pada perbaikan kondisi kerja dan penguatan perlindungan tenaga kerja. Penelitian ini selaras karena sama-sama membahas keterlibatan Uni Eropa dalam mendorong perubahan di sektor perikanan Thailand. Namun, penelitian ini fokusnya lebih kepada bagaimana isu ketenagakerjaan dimasukkan dalam proses dialog kebijakan, sedangkan penelitian penulis melihat hal tersebut sebagai bagian dari keberlanjutan keterlibatan Uni Eropa dan Thailand pasca-pencabutan *yellow card*.

Natalia dan Ardhanariswari (2025) meneliti upaya ASEAN dalam mendorong perlindungan pekerja migran di sektor perikanan melalui peran

organisasi internasional sebagai arena, instrument, dan juga aktor. Dalam penelitian ini ASEAN mampu mendorong permasalahan perlindungan tenaga kerja menjadi sebuah agenda regional melalui pembentukan deklarasi dan pedoman, serta memperkuat kerja sama antarnegara. Tetapi di satu sisi, ASEAN masih menghadapi berbagai permasalahan dan keterbatasan karena komitmen yang tidak mengikat dan lemahnya implementasi di tingkat negara anggota. Penelitian ini selaras dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas praktik *modern slavery* di sektor perikanan. Tetapi, penelitian ini lebih fokus pada peran ASEAN dalam konteks regional, sedangkan penelitian penulis lebih pada kebijakan perdagangan Uni Eropa terhadap Thailand dan penanganan *modern slavery* pasca-pencabutan *yellow card*.

Sementara itu, penelitian oleh McGovern et al (2025) menjelaskan bagaimana Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dalam mengatur akses pekerja migran terhadap pasar tenaga kerja. Penelitian ini membahas tentang negara-negara Eropa yang menerapkan berbagai kebijakan yang lebih ketat untuk membatasi persaingan tenaga kerja, seperti persyaratan upah minimum, pembatasan jenis pekerjaan, dan peraturan akses kerja bagi pekerja migran. Penelitian ini sesuai dengan penelitian penulis dalam memberikan gambaran mengenai pendekatan Uni Eropa dalam mengatur isu tenaga kerja migran melalui kebijakan yang bersifat lebih ketat. Namun penelitian tersebut lebih fokus pada negara-negara Eropa, sedangkan penelitian penulis lebih pada keterlibatan Uni Eropa dalam penanganan *modern slavery* di sektor perikanan dan kebijakan perdagangannya yang dapat memengaruhi kebijakan Thailand.

Vinh Sum Chau dan Montita Bunsiri (2022) membahas sebuah paradoks baru dalam manajemen keberlanjutan dengan mengkaji kesulitan penerapan regulasi IUU fishing Uni Eropa di perairan Thailand, melalui wawancara terhadap para pemangku kepentingan utama di sektor perikanan Thailand untuk mengeksplorasi kekhususan wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan *configuration theory* dari perspektif manajemen strategis untuk memandu penelitian empiris dan memperluas penerapannya ke dalam konteks regulasi lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa ketika keterlibatan dalam isu keberlanjutan dirasa lebih menguntungkan secara bisnis bagi para pemangku

kepentingan, keterlibatan yang lebih eksplisit justru dapat terjadi dengan cara yang salah, sehingga tujuan keberlanjutan yang sesungguhnya justru dijalankan dengan lebih buruk dan tidak terkelola dengan baik, yang berpotensi menghasilkan kondisi yang lebih buruk dibandingkan kondisi awal. Hal ini terjadi karena regulasi cermat dalam menetapkan target, tetapi tidak efektif dalam melibatkan para pemangku kepentingan kunci. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji penerapan regulasi IUU fishing Uni Eropa terhadap Thailand. Namun, penelitian tersebut menyoroti paradoks manajemen keberlanjutan di tingkat komunitas dan pemangku kepentingan lokal sektor perikanan, dengan unit analisis pada interaksi antar-stakeholder domestik dalam menjalankan regulasi. Penelitian tersebut tidak menggunakan kerangka hubungan internasional maupun kebijakan dagang antarnegara sebagai pisau analisisnya. Sementara penelitian penulis berfokus pada level kebijakan negara-ke-negara antara Uni Eropa dan Thailand melalui *conditionality*, serta menyoroti keberlanjutan keterlibatan Uni Eropa pasca-pencabutan yellow card dalam menangani *modern slavery* yang belum menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

Penelitian oleh Mary Sebastian dan Bethany Jackson (2024) membahas keterkaitan *modern slavery*, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim dalam sektor perikanan Thailand. Penelitian ini memperlihatkan bahwa eksploitasi tenaga kerja dan kerusakan lingkungan saling berkaitan dan dapat memperkuat satu sama lain, tekanan terhadap sumber daya laut mendorong kebutuhan akan tenaga kerja yang murah dan menjadi rentan terhadap praktik eksploitatif. Selain itu, perubahan iklim juga memperparah kondisi tersebut dengan meningkatkan kerentanan pada kelompok pekerja dan tekanan terhadap ekosistem laut. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis dalam memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat memperkuat praktik *modern slavery* di sektor perikanan Thailand. Tetapi, penelitian ini membahas keterkaitan antara lingkungan dan sosial, sedangkan penelitian penulis membahas kebijakan perdagangan Uni Eropa dalam menangani *modern slavery* pasca-pencabutan *yellow card*.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami *modern slavery* di Thailand dan kebijakan

perdagangan yang dapat memengaruhi perubahan kebijakan di Thailand, baik dari sudut pandang hukum domestik, keterlibatan organisasi internasional, maupun peraturan di sektor perikanan. Namun, sebagian besar penelitian masih fokus pada periode sebelum atau selama pemberlakuan *yellow card*. Pembahasan mengenai bagaimana Uni Eropa mempertahankan keterlibatannya setelah kebijakan tersebut dicabut masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memusatkan perhatian pada interaksi Uni Eropa pasca-2019. Dalam hal ini, hubungan perdagangan tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai ruang di mana pengaruh tetap berlangsung melalui kebijakan perdagangan, pengelolaan rantai pasok, serta penguatan standar keberlanjutan.

2.1 Tinjauan Literatur

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Teori dan Konsep	Temuan	Perbedaan
1.	Peran International Labour Organization dalam Mengatasi Fenomena Seafood Slavery di Thailand Tahun 2019-2023	Alda Sapitri, Angga Nurdin Rachmat, dan Muhammad Fauzan Alamari (2024)	Liberalisme Institusional (Peran Organisasi Internasional: Instrumen, Arena, Aktor)	ILO membantu Thailand dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan memberi acuan aturan yang harus dipenuhi serta dukungan dalam menyusun dan menjalankan kebijakannya.	Penelitian ini melihat pada kebijakan perdagangan Uni Eropa yang tetap berlanjut pasca-pencabutan <i>yellow card</i> dan penanganan <i>modern slavery</i> di sektor perikanan Thailand. Tidak hanya melihat dukungan dari organisasi internasional saja
2.	Shaping Ocean Governance: A Study of EU Normative Power on Thailand's Sustainable Fisheries	Ajaree Tavornmas & Kasira Cheeppensook (2020)	Normative Power Europe (NPE)	Uni Eropa melalui kebijakan IUU Fishing mendorong Thailand dalam menyesuaikan kebijakan perikanan agar sesuai dengan standar internasional, menunjukan Uni	Penelitian penulis melihat <i>conditionality</i> dalam kebijakan perdagangan serta penanganan <i>modern slavery</i> pasca-pencabutan <i>yellow card</i> .

				Eropa sebagai penyebar norma	
3.	From Breaker to Follower: Dinamika Proses Domestikasi Norma Anti-Perbudakan Modern oleh Pemerintah Thailand	Muhammad Subhan, Roihanatul Maziyah, Marten Hanura, Palupi Anggraheni, dan Dewi Setyaningsih (2025)	Norm Life Cycle, Jaringan Advokasi Transnasional	perubahan kebijakan Thailand dalam menangani <i>modern slavery</i> terjadi melalui proses domestikasi norma internasional yang didorong oleh jaringan advokasi transnasional, khususnya NGO seperti EJP dan LPN. Proses ini berlangsung melalui tahapan <i>norm emergence</i> , <i>norm cascade</i> , dan <i>norm internalization</i> , hingga akhirnya diadopsi dalam kebijakan domestik Thailand.	Penelitian penulis melihat Uni Eropa melalui kebijakan perdagangan sebagai bentuk <i>conditionality</i> dan keberlanjutannya dalam penanganan <i>modern slavery</i> di sektor perikanan Thailand pasca-pencabutan <i>yellow card</i> .
4.	EU-Third Country Dialogue on IUU Fishing: The Transformation of Thailand's Fisheries Laws	Yoshiko Naiki & Jaruprapa Rakpong (2022)	Regulatory power & legitimacy	Mengaitkan IUU fishing dengan kondisi perburuan Thailand yang buruk dan memperluas cakupan isu, Uni Eropa dapat memberikan tekanan lebih besar kepada pemerintah Thailand untuk melakukan reformasi hukum, menunjukan EU menjalankan kekuatan keahlian, pemantauan, dan penetapan agenda untuk	Penelitian ini menggunakan konsep kekuatan regulasi & legitimasi (<i>regulatory power and legitimacy</i>) untuk menjelaskan proses dialog EU-Thailand selama periode <i>yellow card</i> berlangsung (2015-2019), dengan fokus pada bagaimana EU menjalankan kekuasaan ekspertis dan monitoring. Penelitian ini belum membahas periode pasca-pencabutan <i>yellow card</i> . Sementara penelitian penulis menggunakan <i>conditionality</i> untuk melihat keberlanjutan

				memfasilitasi kemajuan Thailand.	tekanan EU dalam kebijakan dagang setelah 2019, dengan fokus khusus pada isu ketenagakerjaan yang masih belum tertangani.
5.	Elucidating the Paradox of Regulating Environmental Sustainability (Mis)management and Motivations: The Case of Thai Fisheries	Vinh Sum Chau & Montita Bunsiri (2022)	Configuration theory	Regulasi IUU fishing EU yang spesifik (Council Regulation No 1005/2008) diterapkan di perairan Thailand dengan konsultasi minimal terhadap mitra internasional maupun pemahaman atas keterbatasan regional spesifik, menimbulkan paradoks dalam manajemen keberlanjutan.	Penelitian ini menggunakan <i>configuration theory</i> dari sudut manajemen keberlanjutan untuk menyoroti paradoks penerapan regulasi EU di tingkat lokal/komunitas nelayan Thailand, dengan data primer wawancara stakeholder lokal. Fokusnya pada dampak implementasi regulasi terhadap komunitas lokal, bukan pada hubungan kebijakan dagang antarnegara. Sementara penelitian penulis berfokus pada level kebijakan negara-ke-negara (EU-Thailand) melalui <i>conditionalit</i>), bukan pada level komunitas/manajemen lokal.
6.	More than Just a Carding System: Labour Implications of the EU's IUU Policy in Thailand	Kadfak & Linke (2021)	Socialisation Mechanism & NPE	Tekanan kebijakan IUU Uni Eropa mendorong reformasi perikanan Thailand, termasuk isu ketenagakerjaan.	Penelitian ini mengkaji keberlanjutan kebijakan perdagangan Uni Eropa setelah tekanan berakhir
7.	The Role and Strategy of ASEAN in Protecting Migrant Fishers	Belardo Prasetya Mega Jaya, et al (2025)	ASEAN Way & Human Security	ASEAN membangun perlindungan melalui regulasi dan kerja sama regional, tetapi	Penelitian ini fokus pada kebijakan perdagangan Uni Eropa dan penanganan <i>modern slavery</i> pasca-pencabutan.

				implementasinya masih terbatas.	
8.	Addressing Decent Work Gaps in the Marine Fishing Sector	Desiana Natalia S & Dwi Ardhanariswari SS (2025)	Peran Organisasi Internasional (Clive Archer)	ASEAN mendorong isu pekerja migran sebagai agenda regional, tetapi implementasinya terbatas.	Penelitian penulis menyoroti kebijakan perdagangan Uni Eropa terhadap Thailand pasca-pencabutan <i>yellow card</i> .
9.	The Return of the State: how European governments regulate labour market competition from migrant workers	McGovern et al (2025)	Immigration Policy Trilemma, Varieties of Capitalism (VoC), dan Collective Action Theory & Liberal Constraint	Uni Eropa mengatur akses pekerja migran melalui kebijakan tenaga kerja yang ketat.	Penelitian ini pada kebijakan perdagangan Uni Eropa terhadap Thailand dalam penanganan <i>modern slavery</i> .
10.	Labour, Climate and Fish: An assessment of the modern slavery-climate change nexus in Thailand's fisheries	Sebastian, M., and Jackson, B. (2024)	Climate Change Nexus	<i>Modern slavery</i> berkaitan dengan degradasi lingkungan dan perubahan iklim dalam sektor perikanan.	Fokus pada faktor lingkungan, bukan pada kebijakan perdagangan Uni Eropa dan penanganan <i>modern slavery</i> .

Berdasarkan literatur pada Tabel 2.1, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dimana adanya persamaan terletak pada pembahasan mengenai keterlibatan pihak luar dalam memengaruhi perubahan kebijakan di sektor perikanan, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja dan penanganan praktik *modern slavery*.